

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan suatu organisasi pastinya tidak jauh dari peran sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya. Dalam upaya pencapaian tujuan instansi, diperlukannya kinerja dari masing-masing individu yang berkualitas. Menurut Raja dan Amanah (2021) sistem akuntansi yang seringkali digunakan oleh instansi yang berada di sektor publik adalah akuntansi sektor publik di mana sistem tersebut menjadi salah satu dari bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Peran sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam jalannya kinerja lembaga, karena tidak sedikit sumber daya manusia yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat berdampak terhadap timbulnya permasalahan jika sumber daya manusia tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi pemerintah diwajibkan dalam menyampaikan Laporan Kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja dijadikan sebagai suatu capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel yang mana hal tersebut merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul terdapat beberapa isu strategis, salah satunya yaitu pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan atas sasaran atau program dan kegiatan belum memadai.

Kinerja manajerial merujuk pada kinerja-kinerja para anggota dalam organisasi yang meliputi kegiatan antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan staf, negosiasi serta representasi (Sofyani *et al.*, 2020). Hal tersebut artinya sejauh mana para anggota organisasi publik dalam mengelola organisasi secara efisien dan efektif sebagai bentuk akuntabilitas (Mauliza dan Astuti, 2022). Permasalahan penyelenggaraan kinerja instansi daerah antara lain: (a) Belum terealisasi dan belum dapat diukur secara objektif hasil dari indikator kinerja. (b) Tidak memadainya sistem data kinerja. (c) Pedoman pengevaluasian kinerja belum diterapkan (Kewo dan Afiah, 2017). Ketiga hal kinerja tersebut yang akan berdampak pada kelemahan aspek manajerial secara keseluruhan. Misalnya, belum terealisasi dan belum dapat diukur secara objektif hasil dari indikator kinerja, hal itu menunjukkan bahwa salah satu fungsi pengendalian dari aspek manajerial sangat lemah. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa manajemen belum mampu dalam menciptakan suatu sistem yang dapat mendukung berjalannya fungsi manajerial.

Suatu instansi dikatakan berhasil apabila semua pihak yang ada di dalamnya mampu bekerja sama dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Raja dan Amanah (2021) perlu diadakannya pengukuran kinerja

dalam menjalankan tugas suatu instansi, hal tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana pegawai melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Ayat Al-Qur'an ini selaras dengan pernyataan tersebut yaitu Surat Al-Mudassir ayat 37-38 tentang pertanggungjawaban:

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “(Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Mudassir:37-38)

Adapun hadis dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.”

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kemana arah organisasi tersebut berjalan, sasaran dan tujuan akan tercapai dengan keberhasilan atau mungkin dengan kegagalan. (Setyawan *et al.*, 2017) mengemukakan bahwa setiap daerah memiliki akuntabilitas kinerja instansi yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perbedaannya yaitu kompetensi dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Jika sumber daya manusia dalam instansi tersebut memiliki *skill* dibidangnya, maka laporan akuntabilitas dalam kinerja manajerial instansi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Apabila suatu instansi memiliki akuntabilitas yang baik, tentu akan baik pula akuntabilitas kinerja manajerialnya.

Adapun hal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja manajerial instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan merupakan suatu laporan yang akan menggambarkan bagaimana sistem pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan (Pratama *et al.*, 2019). Laporan yang baik merupakan laporan yang telah disusun secara objektif, jujur dan transparan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh LAN dan BPKP. Budiastawa *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Semakin baik sistem pelaporan dapat meningkatkan kinerja manajerial, kemudian dengan sistem pelaporan yang semakin relevan dan akurat akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja manajerial suatu organisasi dalam pengambilan keputusan dalam memanfaatkan anggaran.

Pada sistem pengendalian yang menerapkan informasi akuntansi dapat disebut dengan sistem pengendalian akuntansi (Setyawan *et al.*, 2017). Sistem formal dan prosedur yang menggunakan informasi dalam guna merubah pola kegiatan organisasi disebut sistem pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja manajerial. Menurut Natalia *et al.*, (2019) pengendalian akuntansi adalah pengendalian intern yang seringkali dipakai dalam suatu organisasi sebagai sistem dalam mengendalikan data-data akuntansi seperti laporan keuangan. Pengendalian akuntansi sendiri berfungsi untuk dapat memastikan kegiatan yang dilakukan terkait sistem operasional organisasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan (Natalia *et al.*,

2019). Dalam penelitian Budiastawa *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Semakin bagusya pengendalian akuntansi, maka manajer akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan demi tercapainya kinerja manajerial yang bagus pula.

Dalam pencapaian kinerja manajerial, faktor lainnya adalah kejelasan sasaran anggaran. Dalam organisasi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran memudahkan pemerintah dalam penyusunan rencana kerja dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah (Melia dan Sari, 2019). Fungsi manajemen yang dapat membantu dalam peningkatan kinerja adalah tujuan serta sasaran anggaran yang jelas dalam suatu organisasi (Anderson dan Stritch, 2016).

Kinerja manajerial merupakan kinerja tiap individu dengan kegiatannya yang mengimplikasikan pada keberhasilan yang dicapai tiap individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (Natalia *et al.*, 2019). Dalam konsteks instansi, kinerja manajerial dapat dijadikan sebagai pondasi dalam tercapainya tujuan instansi sebagaimana yang tertulis dalam visi dan misi (Natalia *et al.*, 2019). Jika kepercayaan publik terhadap instansi tersebut rendah, maka hal itu disebabkan oleh kinerja manajerial di instansi tersebut buruk (Setyawan *et al.*, 2017). Hal tersebut akan berdampak terhadap lemahnya pengaruh akuntabilitas, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi pada kinerja manajerial.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkompilasikan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiastawa *et al.*, (2021) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah” dengan penelitian yang dilakukan oleh Nengsy (2017) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial PT. Perkebunan Nusantara V, Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah akuntabilitas, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengkaji seberapa berpengaruhnya variabel akuntabilitas, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Atas dasar itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah (Studi Empiris: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul).**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bukti empiris mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah.

2. Manfaat secara Praktis

Hasi penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya penyelesaian masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait kinerja manajerial instansi pemerintah daerah. Penelitian ini selanjutnya diharapkan mampu berperan dalam memberikan bantuan pemikiran pada pihak pemerintah daerah dalam memaksimalkan upaya kinerja manajerial yang dirasa kurang memadai.